

Desentralisasi Fiskal *Dan* Kinerja Keuangan Daerah



Dr. Fathurrahman, SE., M.Ak

Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

Penulis:

Dr. Fathurrahman, SE., M.Ak



Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

Copyright © PT Penamuda Media, 2026

Penulis:

Dr. Fathurrahman, SE., M.Ak

ISBN: 978-634-7431-87-5

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Januari 2026

viii + 159 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis



Kata Pengantar

Keuangan daerah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya sendiri, menentukan prioritas belanja, dan menyesuaikan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, tetapi juga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memahami seluk-beluk desentralisasi fiskal, mekanisme pengelolaan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini menyajikan materi secara komprehensif, dimulai dari konsep dasar dan prinsip pengelolaan fiskal, kerangka regulasi, sumber pendapatan daerah, hingga perencanaan dan penganggaran yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan evaluasi kinerja keuangan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran publik. Dengan demikian, pembaca diajak untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana praktik desentralisasi fiskal dijalankan dalam konteks pembangunan nyata di daerah.

Selain memberikan pemahaman konsep, buku ini juga menyoroti hubungan antara kapasitas fiskal daerah dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pengurangan kesenjangan



antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar persoalan angka dan laporan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Materi disusun dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga relevan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami isu keuangan publik dan desentralisasi.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini menggabungkan analisis teoretis dan praktik nyata. Penulis berusaha menampilkan dinamika regulasi, tantangan pengelolaan pendapatan, strategi optimalisasi belanja, serta indikator kinerja yang relevan. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang utuh dan membantu pembaca dalam memahami kompleksitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan inspirasi bagi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi referensi yang bermanfaat dan mampu mendorong pemahaman lebih mendalam tentang desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah, serta peranannya dalam pembangunan lokal yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Kami berharap buku ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah demi kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Mataram, Januari 2026

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1. Konsep Dasar Desentralisasi Fiskal	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal	1
B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Fiskal dalam Pemerintahan Daerah.....	10
C. Landasan Hukum Desentralisasi Fiskal.....	16
D. Tujuan dan Urgensi Desentralisasi bagi Kemandirian Daerah.....	22
Bab 2. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Keuangan Daerah	32
A. Evolusi Kebijakan Fiskal Daerah	32
B. Struktur Kelembagaan Pengelola Keuangan Daerah	37
C. Peran Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Fiskal.....	41
D. Dinamika Regulasi Dana Transfer dan Otonomi Daerah.....	45
Bab 3. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	51
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
B. Dana Perimbangan dan Transfer ke Daerah.....	56
C. Pembiayaan Daerah dan Optimalisasi Pendapatan	61
D. Tantangan Peningkatan Kapasitas Fiskal	65
Bab 4. Perencanaan dan Penganggaran Daerah	72
A. Siklus Perencanaan Penganggaran Daerah	72
B. Penyusunan APBD Berdasarkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas	77
C. Prioritas Belanja Publik dalam Kerangka Pembangunan Daerah.....	82
D. Evaluasi Penganggaran sebagai Instrumen Kinerja	88



Bab 5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Daerah	93
A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.....	93
B. Transparansi Keuangan dan Audit Keuangan Publik	98
C. Peran Teknologi Informasi dalam Akuntabilitas Fiskal	100
D. Indikator Tata Kelola Keuangan yang Baik	105
Bab 6. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	111
A. Konsep dan Indikator Kinerja Keuangan	111
B. Rasio Keuangan dalam Evaluasi Kinerja Daerah	116
C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah.....	122
D. Pengukuran Kapasitas Fiskal dan Derajat	
Kemandirian.....	127
Bab 7. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Ekonomi	
Daerah	132
A. Keterkaitan antara Kapasitas Fiskal dan Pertumbuhan	
Ekonomi	132
B. Pengaruh Belanja Publik terhadap Peningkatan	
Kesejahteraan	136
C. Pemerataan Fiskal dan Pengurangan Ketimpangan Antar	
Wilayah.....	140
D. Model Penguatan Peran Fiskal dalam Pembangunan	
Daerah.....	144
Referensi.....	153
Tentang Penulis.....	157





Bab 1.

Konsep Dasar Desentralisasi Fiskal

A. Definisi dan Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara umum dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan publik. Pelimpahan tersebut meliputi hak untuk memperoleh sumber pendapatan, menentukan prioritas belanja, dan menyelenggarakan layanan publik berdasarkan kebutuhan lokal. Secara konseptual, desentralisasi fiskal berupaya menciptakan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan fiskal dapat lebih responsif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kapasitas daerah. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi pilar utama reformasi pemerintahan modern untuk mendukung tata kelola yang terbuka, adaptif, dan efisien di tingkat lokal.



Dalam perspektif terminologi, desentralisasi fiskal mencakup dua komponen besar, yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Pada sisi pendapatan, daerah diberikan otoritas menggali Pendapatan Asli Daerah, mengelola pajak dan retribusi tertentu, serta menerima transfer dari pusat. Sementara pada sisi pengeluaran, daerah memiliki kewenangan menetapkan program, kegiatan, dan alokasi belanja sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan masing-masing wilayah. Terminologi ini menekankan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya soal transfer dana, tetapi mencakup proses penguatan kapasitas daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan keuangan publik.

Secara normatif, desentralisasi fiskal dirancang untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik. Pemerintah daerah yang lebih mengenal karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya diyakini mampu merancang program publik yang lebih sesuai, sehingga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Teori-teori keuangan publik menegaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mengurangi asimetri informasi antara pembuat kebijakan dan penerima layanan, di mana



pemerintah pusat sering kali tidak memiliki pengetahuan detail mengenai kondisi lokal. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan fiskal menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Beberapa ahli menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh desain hubungan keuangan antarpemerintah (intergovernmental fiscal relations). Misalnya, Bahl dan Martinez-Vazquez menyoroti bahwa desain sistem pajak daerah, mekanisme transfer, dan formula pemerataan fiskal merupakan faktor fundamental untuk mencegah ketimpangan antarwilayah dan memastikan setiap daerah dapat membiayai layanan publik secara memadai (Bahl & Martinez-Vazquez, 2018). Dalam pandangan ini, desentralisasi fiskal tidak sekadar distribusi wewenang, tetapi merupakan sistem yang harus dirancang agar mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal antar daerah.

Di tingkat empiris, praktik desentralisasi fiskal menunjukkan variasi keberhasilan yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas administratif, kualitas tata kelola, dan komitmen politik. Daerah dengan kapasitas perencanaan dan penganggaran yang kuat cenderung



memanfaatkan ruang fiskal lebih optimal, sementara daerah yang lemah dalam manajemen anggaran sering menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi dan efektivitas belanja publik. Hal ini menggambarkan bahwa desentralisasi fiskal tidak otomatis menghasilkan kinerja yang baik; dibutuhkan perangkat kelembagaan, sistem pengawasan, dan sumber daya manusia yang kompeten agar kewenangan fiskal dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Beberapa literatur menambahkan bahwa desentralisasi fiskal juga memiliki kaitan langsung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Dengan kewenangan yang berada lebih dekat kepada masyarakat, proses perencanaan dan penyusunan anggaran dapat melibatkan warga secara lebih intensif sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Laporan Asian Development Bank menegaskan bahwa tata kelola penganggaran yang partisipatif merupakan kunci untuk memastikan bahwa keputusan fiskal benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan mendukung efisiensi penyediaan layanan (Asian Development Bank, 2020). Dengan demikian,



desentralisasi fiskal memiliki dimensi demokratisasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pendekatan teoritis lainnya, desentralisasi fiskal dijelaskan melalui teori federalisme fiskal yang menyatakan bahwa desentralisasi memberikan insentif persaingan positif antarwilayah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan anggaran. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah akan berupaya menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan warganya melalui kebijakan fiskal yang inovatif. Dengan demikian, transfer kewenangan fiskal menciptakan kondisi di mana daerah berlomba memberikan layanan terbaik, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi agregat di tingkat nasional. Namun, teori ini tetap menekankan pentingnya regulasi dan koordinasi agar persaingan antarwilayah tidak justru menimbulkan ketimpangan.

Keseluruhan definisi di atas mencakup pandangan bahwa daerah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi sebagai entitas yang memiliki kemandirian fiskal, akuntabilitas, dan kapasitas untuk mengelola anggaran secara efektif. Sebagai instrumen reformasi, desentralisasi fiskal menuntut sinergi antara kerangka regulasi yang jelas, sistem transfer yang adil, serta kebijakan pendapatan



dan belanja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman komprehensif tentang konsep ini, pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan kerangka pembagian kewenangan dan sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kemandirian daerah. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup mekanisme penyaluran dana, tetapi juga bagaimana daerah diberi ruang untuk mengambil keputusan secara lebih otonom, baik dalam pendapatan, belanja, maupun manajemen fiskalnya. Pemahaman terhadap ruang lingkup ini penting karena menentukan sejauh mana daerah dapat mengelola kebijakan ekonomi dan pembangunan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.



1. Kewenangan Pendapatan Daerah

Ruang lingkup ini mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan berbagai bentuk pendapatan asli daerah lainnya. Kewenangan ini penting karena menentukan tingkat kemandirian fiskal daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat. Dengan pendapatan yang memadai, daerah dapat merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal secara lebih fleksibel dan responsif. Di banyak negara, kapasitas pendapatan yang kuat juga menjadi indikator utama efektivitas desentralisasi fiskal.

2. Alokasi dan Pengelolaan Belanja Daerah

Ruang lingkup ini berkaitan dengan kewenangan daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan menggunakan anggaran belanja untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat karena proses pengambilan keputusan tidak lagi tersentralisasi.



Pengaturan belanja juga mencerminkan prioritas pembangunan daerah, sehingga efektivitasnya bergantung pada kualitas perencanaan, kompetensi SDM, serta mekanisme pengawasan internal.

3. Transfer Antar-Pemerintah (Intergovernmental Fiscal Transfers)

Transfer dari pemerintah pusat ke daerah seperti DAU, DAK, dan DBH merupakan ruang lingkup penting dalam desentralisasi fiskal karena berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal antar-daerah. Transfer ini memastikan daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan pelayanan dasar publik. Selain pendanaan rutin, mekanisme transfer juga mencakup insentif berbasis kinerja untuk mendorong tata kelola yang baik dan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

4. Kewenangan Pinjaman dan Pembiayaan Daerah

Ruang lingkup ini memberikan izin bagi daerah untuk melakukan pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek guna membiayai proyek-proyek strategis seperti infrastruktur besar yang tidak dapat didanai hanya dengan pendapatan tahunan. Meski demikian, kewenangan ini harus



diawasi ketat karena berisiko menimbulkan beban fiskal berlebihan jika tidak dikelola dengan prudent. Oleh karena itu, pemerintah pusat biasanya menetapkan batasan rasio pinjaman dan persyaratan administratif agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

5. Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas Fiskal

Ruang lingkup ini mencakup mekanisme pelaporan keuangan, audit, evaluasi kinerja, dan transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik. Tata kelola yang baik memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah praktik korupsi dan inefisiensi. Dengan sistem akuntabilitas yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah meningkat, dan efektivitas desentralisasi fiskal dapat tercapai secara menyeluruh.

6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Daerah

Desentralisasi fiskal juga mencakup ruang lingkup peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, serta



evaluasi program. Tanpa kapasitas yang memadai, kewenangan fiskal yang besar berpotensi tidak optimal bahkan dapat menyebabkan kesalahan pengelolaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa desentralisasi fiskal berjalan efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

7. Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal

Ruang lingkup terakhir adalah pengawasan oleh inspektorat daerah, BPK, maupun lembaga lainnya untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai peraturan. Pengawasan tidak hanya berfungsi mendeteksi pelanggaran, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola fiskal semakin profesional. Mekanisme ini menciptakan check and balance antara berbagai aktor pemerintahan sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan.

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Fiskal dalam Pemerintahan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan fiskal dalam pemerintahan daerah merupakan fondasi utama bagi terciptanya tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik



yang berkualitas. Dalam konteks desentralisasi fiskal, daerah tidak hanya diberi kewenangan untuk mengelola dana publik, tetapi juga diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, efisien, dan sesuai regulasi. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal, memprioritaskan belanja, mengoptimalkan pendapatan, serta menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan fiskal yang baik tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (OECD, 2019). Selain itu, berbagai kajian internasional menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kedisiplinan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang konsisten dan sesuai standar global.

1. Prinsip Transparansi Anggaran

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan fiskal daerah karena memastikan bahwa seluruh proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga



pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Akses informasi ini memungkinkan publik mengawasi penggunaan anggaran serta menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Dengan transparansi, potensi penyimpangan dapat ditekan, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Implementasi transparansi juga semakin diperkuat melalui digitalisasi seperti e-budgeting dan e-reporting yang memperkecil ruang tertutup dalam manajemen keuangan daerah (Putri & Rahman, 2021).

2. Prinsip Akuntabilitas Kinerja Fiskal

Akuntabilitas menekankan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik melalui laporan kinerja dan laporan keuangan yang auditabel. Prinsip ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan sesuai tujuan, peraturan, serta manfaat publik. Pemerintah daerah wajib mengukur output, outcome, dan dampak dari setiap program sehingga kinerja fiskal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Tanpa



akuntabilitas, desentralisasi fiskal berpotensi menjadi tidak efektif meski kewenangan besar telah diberikan kepada daerah.

3. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

Efisiensi dan efektivitas menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil pembangunan dengan sumber daya yang terbatas dan meminimalkan pemborosan anggaran. Efisiensi tercapai saat biaya yang dikeluarkan sesuai dengan standar ekonomi, sedangkan efektivitas tercapai apabila program benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, prinsip ini sangat penting agar belanja publik tidak hanya terserap tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Prinsip Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal menekankan pentingnya kemampuan daerah dalam membiayai program dan kebutuhannya sendiri melalui pendapatan asli daerah tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat. Prinsip ini menentukan posisi daerah dalam sistem desentralisasi fiskal, karena



daerah yang mandiri dapat lebih fleksibel dalam merancang kebijakan strategis. Selain itu, kemandirian fiskal menjadi indikator kesehatan ekonomi daerah serta kualitas kebijakan pengelolaan pendapatan lokal yang dijalankan. Banyak kajian menunjukkan bahwa daerah dengan PAD tinggi cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih baik (Iskandar, 2020).

5. Prinsip Pemerataan dan Keadilan Fiskal

Pemerataan menekankan distribusi sumber daya yang adil antarwilayah agar seluruh daerah, termasuk daerah tertinggal, memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan. Prinsip ini menjadi penting karena disparitas fiskal sering kali muncul akibat perbedaan kapasitas ekonomi daerah. Melalui prinsip ini, pemerintah pusat dan daerah memastikan bahwa pembiayaan untuk layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tidak mengalami kesenjangan yang ekstrem. Dalam konteks transfer fiskal, prinsip keadilan menjadi dasar desain Dana Alokasi Umum dan skema equalization grants.



6. Prinsip Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Nasional

Pengelolaan fiskal daerah harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan serta standar nasional seperti sistem akuntansi pemerintahan, regulasi pinjaman daerah, dan mekanisme transfer pusat. Kepatuhan ini memastikan konsistensi tata kelola fiskal di seluruh daerah serta mencegah terjadinya kesalahan administratif atau fiskal. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi membantu menjaga kredibilitas laporan keuangan daerah, memudahkan proses audit, dan memastikan keselarasan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang lebih luas (Peraturan Perundang-undangan RI, 2016).

7. Prinsip Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran

Partisipasi publik memastikan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan anggaran melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau mekanisme keterlibatan daring. Dengan partisipasi tersebut, program yang dirancang pemerintah daerah akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih mudah diterima pada tahap implementasi. Selain itu, partisipasi



Desentralisasi Fiskal *Dan* Kinerja Keuangan Daerah

Buku ini membahas secara komprehensif bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal memengaruhi kapasitas, tata kelola, dan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui kajian terhadap konsep dasar, kerangka regulasi, struktur pendapatan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja fiskal, buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi daerah dalam mengelola keuangan publik secara efektif. Dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja, buku ini menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, serta pemangku kepentingan yang ingin memahami dinamika keuangan daerah dan masa depan desentralisasi fiskal di Indonesia.

ISBN 978-624-7431-87-5



9

786347

431875



Penamuda.com

PT Penamuda Media
Casa Sidoarum, Ngentak Godean
penamuda.media